

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup. Kemiskinan merupakan masalah global yang dihadapi dan menjadi perhatian dunia. Negara miskin masih dihadapkan dengan masalah pertumbuhan dan distribusi pendapatan yang tidak merata. Sementara itu banyak negara berkembang yang masih mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun masih kurang dalam memberikan manfaat bagi penduduk miskinnya. Secara umum, kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi dimana seseorang atau kelompok orang yang tidak mampu dalam memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat dari pekerjaan yang dimiliki untuk menghasilkan uang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang. Kemiskinan adalah standar tingkat hidup yang rendah karena kekurangan materi pada sejumlah atau golongan orang yang dibandingkan dengan standar kehidupan yang berlaku di masyarakat sekitarnya.¹

Kemiskinan juga disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Beberapa faktor utama penyebab kemiskinan pendidikan rendah, kesehatan buruk, pengangguran dan kurangnya kesempatan kerja, ketimpangan sosial dan ekonomi, dan lingkungan. Dalam mengatasi kemiskinan juga memerlukan pendekatan holistik yang dimana melibatkan pendidikan, kesehatan, penciptaan lapangan pekerjaan, serta kebijakan sosial dan ekonomi yang adil.

Di wilayah desa Mentalitas masyarakat miskin di desa sering kali didominasi oleh sikap "nrimo" (menerima) apa adanya dan tidak berusaha untuk memperbaiki kondisi hidup mereka. Sikap ini sebenarnya mencerminkan adanya masalah sosial ekonomi. Mereka juga memiliki prinsip hidup yang menjadi filosofi dasar, yaitu "apa

¹Nabila Eka Marza Oktavia dan Aris Soelistyo, "Faktor-Faktor Penentu Kemiskinan Di Indonesia: Analisis Rumah Tangga," *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan* 4, no. 1 (2018): 17–33.

yang didapat hari ini untuk dinikmati hari ini, urusan besok adalah urusan hari esok". Prinsip ini membuat mereka menikmati hidup tanpa memikirkan kerentanan yang mungkin terjadi di masa depan.

Kemiskinan di desa ialah *problem* yang kompleks yang dihasilkan dari berbagai faktor, seperti rendahnya produktivitas pertanian, kurangnya akses pasar dan sumber daya, serta terbatasnya pendidikan dan pelatihan. Dampaknya mencakup rendahnya kesehatan, gizi, dan kesejahteraan sosial, serta rendahnya partisipasi dalam pembangunan. Untuk mengurangi kemiskinan di pedesaan, diperlukan langkah-langkah terintegrasi seperti meningkatkan akses pendidikan dan pelatihan, memperluas akses pasar dan sumber daya, serta meningkatkan produktivitas pertanian.²

Di Indonesia, kemiskinan perkotaan telah menjadi masalah nasional yang mendesak untuk ditangani dengan serius. Sejak saat kehadiran kota, masyarakat miskin adalah gejala sosial yang sangat serius, hal ini karena kemiskinan dianggap sebagai sesuatu yang abadi dan berkelanjutan di mana sulit untuk diubah melalui tindakan atau reformasi semata.

Dengan tingkat kemiskinan yang lebih rendah di perkotaan dibandingkan di pedesaan, masalah kemiskinan menjadi fokus perhatian karena kompleksitasnya yang beragam. Namun, jika tidak ditangani dengan cepat, kemiskinan di perkotaan justru bisa meningkat melebihi tingkat kemiskinan di pedesaan. Selain faktor-faktor ekonomi seperti lapangan kerja, pendapatan, dan lingkungan, kemiskinan perkotaan juga terhubung dengan masalah sosial seperti tingkat kejahatan, kekerasan, kriminalitas, dan ketidakmampuan sosial. Hal-hal ini dapat berkontribusi pada penurunan kesempatan kerja dan meningkatkan angka pemutusan hubungan kerja (PHK). Meskipun perkembangan perkotaan terlihat maju secara ekonomi, namun kenyataannya, kemiskinan dan masalah sosial seperti pencurian, pelacuran, dan penyalahgunaan alkohol tetap menjadi risiko sosial yang signifikan, termasuk kejahatan serius seperti pembunuhan dan kerusakan.

²Tuti Alawiyah dan Farhan Setiawan, "Pengentasan Kemiskinan Berbasis Kearifan Lokal pada Masyarakat Desa," *Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi)* 15, no. 2 (2021): 131–54, <https://doi.org/10.24815/jsu.v15i2.22392>.

Selain itu, kekhawatiran yang terdapat di daerah perkotaan seringkali berbeda dengan yang terdapat di pedesaan. Masyarakat perkotaan cenderung mengembangkan individualisme yang dipengaruhi oleh kesibukan, harapan, dan aspirasi dalam dunia kerja. Sementara itu, kondisi di pedesaan seringkali ditentukan oleh ketersediaan SDA yang dapat dikelola guna pemenuhan kebutuhan mereka.

Kemiskinan di masyarakat, terutama di perkotaan, seringkali dipahami sebagai akibat dari kemampuan yang rendah dalam hal keterampilan dan tanggung jawab terhadap pekerjaan, diperparah dengan keterbatasan peluang kerja. Hal ini sering kali terkait dengan ketidakmampuan pemerintah dalam penyediaan lapangan kerja yang memadai bagi masyarakat..³

Pada Maret 2022, kemiskinan di Indonesia mencapai 26,36 juta jiwa. Menurut data BPS, kemiskinan turun menjadi 9,54 persen setelah pendataan ulang, mengalami penurunan 0,17 persen poin dari September 2021 dan 0,60 persen poin dari Maret 2021. Namun, pada September 2022, tingkat kemiskinan naik tipis menjadi 9,57 persen dibandingkan dengan Maret 2022. Meskipun demikian, secara keseluruhan, tingkat kemiskinan di Indonesia menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.⁴

Menurut Bank Dunia, meskipun pemerintah Indonesia mengklaim penurunan tingkat kemiskinan dari tahun 2011 hingga 2022, data mereka menunjukkan sebaliknya. Bank Dunia mencatat peningkatan jumlah penduduk miskin dari 54 juta menjadi 67 juta pada periode tersebut, dengan 13 juta penduduk mengalami penurunan status ekonomi. Perubahan ini disebabkan oleh penyesuaian Bank Dunia terhadap standar kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan dengan standar yang digunakan oleh pemerintah Indonesia. Dalam laporan terbaru, Bank Dunia menggunakan batas garis kemiskinan berdasarkan paritas daya beli (PPP) tahun 2017.

³Mohammad Amin Lasaiba, “Perkotaan dalam Perspektif Kemiskinan, Permukiman Kumuh dan Urban Heat Island (Suatu Telaah Literatur),” *Geoforum* 1, no. 2 (2022): 63–72, <https://doi.org/10.30598/geoforumvol1iss2pp63-72>.

⁴Badan Pusat Statistik “Jumlah Penduduk miskin di Indonesia”, <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html>, diakses pada tanggal 4 Juli 2024, pukul 14.26.

Menurut World Population Review (WPR), Indonesia saat ini menempati peringkat ke-73 sebagai negara termiskin di dunia.

Kemiskinan menghambat kemajuan suatu daerah atau negara dan mempengaruhi kualitas SDM. Akses terbatas terhadap pendidikan, kesehatan, dan gizi yang memadai mengakibatkan penurunan produktivitas. Oleh karena itu, fokus kebijakan pada penurunan kemiskinan sangat penting karena beberapa alasan tersebut. *Pertama*, tingkat kemiskinan yang tinggi menghambat akses masyarakat terhadap pinjaman dan pendidikan untuk anak-anak mereka. *Kedua*, orang kaya yang jatuh miskin cenderung tidak melakukan penghematan, menabung, atau berinvestasi. *Ketiga*, pendapatan rendah dapat mempengaruhi kesehatan, nutrisi, dan produktivitas. *Keempat*, peningkatan pendapatan di kalangan masyarakat miskin dapat mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Terakhir, upaya pengurangan kemiskinan dapat mendorong ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah perlu mengambil langkah konkret untuk mengatasi kemiskinan, bukan sekadar mengubah statusnya.⁵

Kementerian Sosial memperkenalkan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk mengurangi kemiskinan rumah tangga dan masalah kesejahteraan sosial. PKH dikelola oleh Dinsos untuk memperkuat perlindungan sosial bagi masyarakat yang hidup dalam kemiskinan. Program ini menyediakan bantuan uang tunai secara langsung kepada keluarga yang kurang mampu dengan persyaratan tertentu. Tujuannya adalah meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan kesehatan yang memadai dan pendidikan yang berkualitas, sebagai langkah untuk mengurangi ketimpangan sosial dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan.

Pemerintah Indonesia memulai Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun 2007 dengan uji coba pertama di tujuh provinsi. Program ini adalah bantuan tunai bersyarat pertama di Indonesia, juga dikenal sebagai Bantuan Langsung Tunai Bersyarat (BLT) atau Conditional Cash Transfers (CCT) internasional. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas hidup rumah tangga sangat miskin dengan memberikan

⁵Tomi Agus Triono dan Reno Candra Sangaji, "Faktor Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Indonesia: Studi Literatur Laporan Data Kemiskinan BPS Tahun 2022," *Jurnal of Society Bridge* 1, no. 1 (2023): 59–67, <https://doi.org/10.59012/jsb.v1i1.5>.

akses kesehatan dan pendidikan. Program ini diharapkan dapat membawa perubahan keuangan yang memungkinkan keluarga penerima manfaat untuk hidup lebih mandiri. Panduan PKH menyatakan bahwa penelitian lain menunjukkan PKH dapat mempengaruhi konsumsi rumah tangga, sebagaimana yang terlihat di negara-negara lain yang menerapkan program serupa.⁶

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 57, juga sebagai Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, telah dibentuk "Tim Pengendalian Program Keluarga Harapan". Tim ini bertugas mengembangkan sistem perlindungan sosial, terutama dalam kesehatan dan pendidikan, sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 31/KEP/MENKO/KESRA/IX/2007. Ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan upaya penanggulangan kemiskinan melalui program-program yang terarah dan terkoordinasi secara efektif, dengan fokus pada penguatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas dan pendidikan yang bermutu.⁷

Sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas dalam mengatasi kemiskinan melalui perlindungan sosial, Pemerintah Indonesia telah memulai Program Keluarga Harapan. Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menegaskan bahwa:

“Perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial”

PKH merupakan bagian integral dari upaya pemerintah Indonesia untuk mengurangi kemiskinan. PKH dikelola oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) baik di tingkat nasional maupun daerah. Pelaksanaannya

⁶UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO, “Analisis Implementasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Desa Suwawal Barat Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara Skripsi,” 2022.

⁷Nova Abizal, Maimun, dan Yulindawati, “Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Kesejahteraan Masyarakat Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Kecamatan Tangan-tangan Kabupaten Aceh Barat Daya),” *Jurnal Ilmiah Basis Ekonomi dan Bisnis* 1, no. 1 (2022): 55–70, <https://doi.org/10.22373/jibes.v1i1.1576>.

dipimpin oleh Kementerian Sosial, bekerja sama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan Pusat Statistik (BPS), PT POS Indonesia, dan Bank Rakyat Indonesia.⁸

PKH bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, terutama di kalangan masyarakat yang kurang mampu. Program ini sejalan dengan upaya untuk mencapai Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs). Sasarannya mencakup peningkatan kondisi sosial ekonomi Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), peningkatan pendidikan anak-anak di RTSM, perbaikan gizi bagi ibu hamil, serta peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi RTSM. Dengan demikian, PKH tidak hanya fokus pada pengurangan kemiskinan secara langsung, tetapi juga memperkuat kapasitas dan peluang RTSM dalam menghadapi tantangan pembangunan sosial dan ekonomi yang lebih luas.

PKH terus melahirkan ide-ide baru untuk terus berkembang. Tujuan kebijakan PKH tidak hanya memastikan bantuan tepat sasaran dan mendukung kelancaran distribusi bantuan sosial, tetapi juga untuk mengakhiri kemiskinan melalui pembentukan PKH-KPM yang bertahap. Hal ini tidak hanya karena tidak memenuhi syarat keanggotaan, tetapi juga karena PKH-KPM diharapkan dapat mandiri dan berdaya.⁹

Pemerintah juga telah mengimplementasikan berbagai strategi untuk mengurangi kemiskinan, seperti memberikan bantuan finansial atau barang kepada kelompok-kelompok yang kurang mampu. Contohnya termasuk Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Bantuan Beras untuk Masyarakat Miskin (Raskin), Bantuan Siswa Miskin (BSM), serta berbagai program bantuan lainnya. Meskipun demikian, pendekatan ini belum terbukti efektif dalam menangani tantangan kompleks yang terkait dengan kemiskinan.

⁸Herman Susanto, "Evaluasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan," *Skripsi*, 2016.

⁹Edwin Satria Permana, "Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Kelurahan Saruni Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang" *Skripsi* 2010 .

PKH adalah program bantuan keuangan yang ditujukan untuk rumah tangga sangat miskin (RTSM). Melalui program ini, RTSM harus memenuhi kriteria tertentu yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. PKH diharapkan dapat berperan dalam mencapai Tujuan Pembangunan Milenium, seperti menghapuskan kemiskinan dan kelaparan ekstrem, mencapai pendidikan dasar yang inklusif, kesetaraan gender, menurunkan angka kematian anak, serta meningkatkan kesehatan ibu.

Melalui PKH, diharapkan peserta (RTSM/KSM) dapat meningkatkan akses mereka terhadap layanan sosial dasar seperti kesehatan, pendidikan, pangan, dan gizi. Program ini juga bertujuan untuk mengurangi disparitas sosial, memperbaiki lingkungan hidup, serta mengatasi berbagai masalah sosial yang dihadapi oleh kelompok miskin.¹⁰

Kebijakan PKH saat ini masih jauh dari mencakup setengah dari total jumlah penduduk miskin di Indonesia, sebagaimana diharapkan. Meskipun ada bantuan sosial lain yang tersedia, perlu adanya perbaikan signifikan dalam implementasi PKH. Banyak masyarakat merasa bahwa distribusi bantuan ini tidak merata. Data menunjukkan bahwa saat ini hanya 2,7% dari total populasi miskin di Indonesia yang mendapatkan manfaat dari PKH. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi mendalam dan penyesuaian strategi untuk meningkatkan efektivitas dan jangkauan PKH agar dapat lebih efisien dalam mengurangi kemiskinan di Indonesia.¹¹

Sejak tahun 2007, PKH telah meningkatkan konsumsi rumah tangga penerima manfaat di Indonesia sebesar 4,8%. Meskipun data menunjukkan penurunan kemiskinan dan peningkatan anggaran untuk mengurangi kemiskinan, namun masih terdapat masalah dalam pelaksanaannya, terutama di DKI Jakarta. Salah satu kendalanya adalah data yang tidak terintegrasi dengan baik dalam pelaksanaan PKH di wilayah ini. Menurut Federasi Pekerja Rakyat Indonesia. Serikat Pekerja (SPRI),

¹⁰Murah, "Program Keluarga Harapan (PKH) Sebagai Investasi Sosial," *Jurnal Ilmiah Rinjani : Media Informasi Ilmiah Universitas Gunung Rinjani* 4, no. 4 (2016): 120–28.

¹¹A P Anggraeni and A A Nugroho, "Evaluasi Kebijakan Pkh (Program Keluarga Harapan) Di Indonesia," *Jurnal of Public Policy and* 4, no. 2 (2022): 39–54, <https://jurnal.stialan.ac.id/index.php/jplan/article/view/529%0Ahttps://jurnal.stialan.ac.id/index.php/jplan/article/download/529/358>.

sekitar 17.000 keluarga miskin di DKI Jakarta tidak mendapatkan akses ke PKH yang dikelola oleh pemerintah pusat.¹²

Pada September 2022, jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta mencapai 494,93 ribu orang, atau sekitar 4,61 persen dari total penduduk. Dibandingkan dengan Maret 2022 yang mencatat 502,04 ribu orang (4,69 persen), terjadi penurunan sebanyak 7.110 orang atau turun 0,08 persen poin. Jika dibandingkan dengan September 2021 yang mencatat 498,29 ribu orang (4,67 persen), terjadi penurunan sebesar 0,06 persen poin. Secara nasional, tingkat kemiskinan mencapai 9,57 persen pada September 2022, naik 0,03 persen poin dari Maret 2022.

Jakarta Barat merupakan salah satu kota administrasi di Provinsi DKI Jakarta yang terdiri dari 8 kecamatan, 56 kelurahan, 586 rukun warga (RW), dan 6.499 rukun tetangga (RT) secara administratif. Beberapa kecamatan yang terdapat di Jakarta Barat antara lain Kembangan, Kebon Jeruk, Palmerah, Grogol Petamburan, Tambora, Taman Sari, Cengkareng, dan Kalideres. Pada bulan September 2022, jumlah penduduk miskin di Jakarta Barat mencapai 113 ribu orang.

Diperlukan bukti yang jelas tentang kesalahan dalam database calon penerima manfaat PKH dan kurang optimalnya metode pendaftaran keluarga miskin sebagai calon penerima manfaat saat ini. Perlu dicari alternatif kebijakan dan skema pendanaan agar semua keluarga miskin di DKI Jakarta dapat menerima layanan serupa PKH secara mandiri dari Pemda DKI Jakarta, mengingat anggaran PKH dari pemerintah pusat terbatas. APBD DKI Jakarta dianggap cukup untuk mendukung PKH daerah, dan kemungkinan kecil untuk mendapatkan tambahan anggaran PKH dari APBN untuk DKI Jakarta diakui.¹³

Dari beberapa wilayah di DKI Jakarta, Jakarta Barat menonjol sebagai wilayah dengan kompleksitas tinggi. Hal ini membuat peneliti lebih tertarik untuk mengkaji implementasi PKH di Jakarta Barat dengan pendekatan kajian Kesejahteraan Sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menggali secara mendalam perkembangan Program Keluarga Harapan dalam mengurangi kemiskinan di wilayah

¹²“Sumber: Badan (jakbarkota.bps.go.id),” 2022.

¹³Hasan, “Analisis Anggaran Dan Potensi Program Keluarga Harapan Lokal Di DKI Jakarta,” *Seknasfitra.Org*, 2020.

tersebut. Maka berangkat dari permasalahan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Di Kelurahan Rawa Buaya Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat Pada Tahun 2022”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran yang dilakukan pendamping dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui Program Keluarga Harapan?
2. Bagaimana Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) bagi masyarakat penerima bantuan?
3. Bagaimana hasil evaluasi program Keluarga Harapan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan peran yang dilakukan pendamping dalam melaksanakan program sehingga program tersebut berjalan maksimal sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.
2. Untuk mengetahui Efektivitas dari Program Keluarga Harapan (PKH) bagi masyarakat yang menerima bantuan dari program tersebut.
3. Untuk mengetahui hasil dari evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis
 - a. Penelitian ini memberikan informasi dan konsep tentang Program Keluarga Harapan (PKH) di desa Rawa Buaya.
 - b. Studi ini diharapkan menjadi karya besar yang memberikan pengetahuan dan informasi, serta sebagai wahana untuk mengidentifikasi pola dan proses kebijakan PKH yang membantu menciptakan keluarga sejahtera dan mengurangi kemiskinan.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan positif bagi pemerintah untuk meningkatkan kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH).
- b. Bagikan pemikiran Anda dengan aparat kecamatan Rawa Buaya yang bertanggung jawab atas pelaksanaan bansos, khususnya di bidang perlindungan sosial.

E. Tinjauan Pustaka

Untuk mencegah kesalahan dan plagiarisme, peneliti melakukan tinjauan pustaka untuk menemukan kesamaan dengan penelitian atau karya serupa sebelumnya. Tinjauan literatur juga digunakan sebagai dasar untuk penelitian mengenai pedoman PKH. Daftar pustaka yang digunakan untuk menulis tugas akhir ini adalah:

Skripsi pertama yang menjadi acuan adalah karya Asti Prichatin berjudul "Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kasegeran, Cilongok, Kabupaten Banyumas" dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk menilai seberapa efektif Program Keluarga Harapan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima manfaat PKH di Desa Kasegeran, Kecamatan Cilongok.¹⁴

Tujuan dari skripsi yang penulis garap adalah: 1). Mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). 2). Mengevaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Rawa Buaya. 3). Mengevaluasi konteks Program Keluarga Harapan dalam mengurangi kemiskinan di Kelurahan Rawa Buaya.

Skripsi kedua yang dijadikan acuan adalah karya Muhammad Yusuf berjudul "Analisis Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa

¹⁴Tulus Tambunan, "Tulus Tambunan. 2001. Perekonomian Indonesia: Teori dan Temuan Empiris. Ghalia Indonesia. hlm. 15," 2001, 15.

Suwawal Barat, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara" dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2022. Tujuan penelitian ini adalah: 1). Menilai implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Suwawal Barat, Kecamatan Mlonggo, yang dilakukan oleh pelaksana program. 2). Mengetahui proses penerimaan manfaat dari Program Keluarga Harapan oleh pelaksana program atau unsur yang berpengaruh di dalamnya.¹⁵

Perbedaan antara skripsi ini dengan penelitian yang saya lakukan adalah: 1). Mengkaji partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program Keluarga Harapan di Kelurahan Rawa Buaya. 2). Mengevaluasi hasil program Keluarga Harapan di Jakarta Barat, terutama di Kelurahan Rawa Buaya. 3). Menilai konteks program Keluarga Harapan dalam mengurangi kemiskinan di Kelurahan Rawa Buaya.

Skripsi ketiga yang dijadikan acuan adalah karya Herman Sutanto berjudul "Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan" dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2016. Tujuan dari penelitian ini adalah: 1). Menilai implementasi program Keluarga Harapan di Kecamatan Kebayoran Lama sesuai dengan petunjuk pelaksanaan. 2). Mengevaluasi efektivitas program Keluarga Harapan di Kecamatan Kebayoran.¹⁶

Meskipun judul skripsinya serupa, namun skripsi Herman Sutanto memfokuskan pada Kecamatan Kebayoran Lama. Dalam skripsinya, Herman Sutanto memberikan masukan positif untuk Program Keluarga Harapan di Kecamatan Kebayoran Lama. Sedangkan dalam penelitian yang saya garap,

¹⁵U I N WALISONGO, "Analisis Implementasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Desa Suwawal Barat Kecamatan ...," *Eprints.Walisongo.Ac.Id*, 2022, [https://Eprints.Walisongo.Ac.Id/Id/Eprint/19266/%0Ahttps://Eprints.Walisongo.Ac.Id/Id/Eprint/19266/1/Skripsi Mukhammad Yusuf.Pdf](https://Eprints.Walisongo.Ac.Id/Id/Eprint/19266/%0Ahttps://Eprints.Walisongo.Ac.Id/Id/Eprint/19266/1/Skripsi%20Mukhammad%20Yusuf.Pdf).

¹⁶Susanto, "Evaluasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan."

fokusnya adalah Evaluasi Program Keluarga Harapan di Kelurahan Rawa Buaya.

F. Kerangka Pemikiran

Bagian ini merupakan penggambaran atau konsep dasar agar dapat dipahami untuk membantu atau mendukung persoalan dalam penelitian diantaranya, sebagai berikut:

1. Peran Pendamping

Pendamping PKH adalah seorang tenaga pendamping yang bertugas untuk memberikan bantuan, pendampingan, dan pelatihan kepada keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH). PKH sendiri adalah program bantuan sosial yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga di Indonesia.

Fungsi dan tugas pendamping PKH meliputi:

a. Pendampingan Keluarga Penerima Manfaat

Pendamping PKH akan memberikan pendampingan kepada keluarga penerima manfaat PKH dalam mengelola bantuan yang diterima, seperti membantu dalam penggunaan kartu PKH, mengarahkan untuk memanfaatkan bantuan dengan bijak, dan memberikan informasi tentang program-program lain yang dapat membantu kesejahteraan keluarga.

b. Pelatihan dan Pemberdayaan

Pendamping PKH akan memberikan pelatihan kepada keluarga penerima manfaat PKH untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam berbagai bidang, seperti keterampilan usaha, pendidikan, kesehatan, dan keuangan. Tujuannya adalah agar keluarga dapat mandiri dan mampu meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri.

c. Monitoring dan Evaluasi

Pendamping PKH akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keluarga penerima manfaat PKH untuk

memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran dan memberikan dampak yang positif. Mereka akan memantau perkembangan keluarga, memberikan saran, dan melaporkan kemajuan kepada pihak yang berwenang.¹⁷

Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) juga memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan keberhasilan program bantuan sosial ini. Berikut adalah beberapa peran utama pendamping PKH:

1. Pemberdayaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

- a) Mendampingi dan membimbing KPM dalam memanfaatkan bantuan yang diterima.
- b) Membantu KPM untuk meningkatkan kesejahteraan melalui kegiatan edukasi dan pemberdayaan ekonomi.

2. Fasilitator

- a) Mengkoordinasikan kegiatan pertemuan kelompok KPM untuk memberikan informasi dan edukasi tentang kesehatan, pendidikan, dan pengelolaan keuangan.
- b) Menjadi penghubung antara KPM dan pihak-pihak terkait, seperti dinas sosial, layanan kesehatan, dan pendidikan.

3. Monitoring dan Evaluasi

- a) Melakukan pemantauan rutin terhadap kondisi KPM dan memastikan bahwa bantuan digunakan sesuai dengan tujuan program.
- b) Mengidentifikasi masalah dan hambatan yang dihadapi oleh KPM serta mencari solusi bersama.

4. Administrasi dan Pelaporan

- a) Mengumpulkan dan mengelola data KPM serta menyusun laporan pelaksanaan program.

¹⁷Website Dinas Sosial, <https://dinsos.asahankab.go.id/pages/profil-pendamping-pkh#:~:text=Pendamping%20PKH%20adalah%20seorang%20tenaga.meningkatkan%20kesejahteraan%20keluarga%20di%20Indonesia>, diakses pada tanggal 26 Juli 2024, Pukul 23.00.

- b) Melaporkan perkembangan dan hasil kegiatan kepada koordinator tingkat kecamatan atau kabupaten/kota.

5. Pendukung Psikososial

- a. Memberikan dukungan emosional dan psikososial kepada KPM untuk membantu mereka mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi.

6. Edukasi dan Sosialisasi

- a) Memberikan informasi dan edukasi tentang pentingnya pendidikan dan kesehatan bagi anak-anak KPM.
- b) Mensosialisasikan kebijakan dan mekanisme PKH kepada masyarakat.

Pendamping PKH harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik, empati, serta pengetahuan yang cukup tentang program dan layanan sosial. Peran mereka sangat krusial dalam memastikan bahwa bantuan sosial yang diberikan melalui PKH dapat benar-benar meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima manfaat.¹⁸

2. Efektivitas

Dalam kamus umum bahasa Indonesia Efektifitas merupakan keterangan yang artinya ukuran hasil tugas atau keberhasilan dalam mencapai tujuan.¹⁹ Selain pengertian dari sudut bahasa, adapun beberapa pengertian efektivitas menurut para ahli.²⁰

- a. Menurut agung kurniawan efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (Operasi kegiatan program atau misi) suatu organisasi atau sejenisnya tanpa adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaanya.
- b. Menurut hidayat, efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target berupa kualitas, kuantitas, dan

¹⁸Suharto, Edi. "Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat." Refleksi Kebijakan Pembangunan Sosial dan Pekerjaan Sosial di Indonesia (2010): 245-258.

¹⁹Suharto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Surabaya: Pt. Indah 1995), H. 742

²⁰<http://dilihatya.com/2664/pengertian-efektivitas-menurut-para-ahli-adalah>, diakses pada tanggal 26 Juli 2024, Pukul 23.40

waktu telah tercapai dengan prinsip semakin besar presentase target yang dicapai maka semakin tinggi efektivitasnya.

- c. Menurut effendy, efektivitas adalah indicator dalam tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sebagai sebuah pengukuran dimanasuatu target telah tercapai sesuai dengan apayang telah direncanakan tersebut.

beberapa pengertian-pengertian efektivitas diatas dapat disimpulkan, bahwa secara umum efektivitas dapat diartikan sebagai adanya suatu pengaruh, akibat, kesan. Efektivitas tidak hanya sekedar memberi pengaruh atau pesan akan tetapi berkaitan juga dengan keberhasilan tujuan, penetapan setandar, profesionalitas, penetapan sasaran, keberadaan program, materi, berkaitan dengan metode atau cara. Sasaran atau fasilitas dan juga dapat memberikan pengaruh terhadap tujuan yang akan dicapai.

Efektivitas program adalah sejauh mana sebuah program mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Ini mencakup evaluasi tentang seberapa baik program tersebut berfungsi dalam mengatasi masalah yang ingin dipecahkan atau memenuhi kebutuhan yang diidentifikasi. Efektivitas program sering diukur dengan melihat hasil akhir dan dampak yang dihasilkan dibandingkan dengan tujuan awal. Berikut adalah beberapa elemen kunci dalam menilai efektivitas program:

- 1) Tujuan dan Sasaran: Mengukur apakah program mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan ini biasanya spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu (SMART).
- 2) Hasil dan Dampak: Menganalisis hasil langsung (output) dan dampak jangka panjang (outcome) dari program. Ini termasuk perubahan positif yang terjadi pada kelompok sasaran atau masyarakat yang diakibatkan oleh program.

- 3) Efisiensi: Menilai seberapa baik sumber daya (waktu, dana, tenaga) digunakan untuk mencapai hasil. Program yang efektif biasanya juga efisien dalam menggunakan sumber dayanya.
- 4) Kualitas Implementasi: Mengevaluasi proses pelaksanaan program, termasuk bagaimana kegiatan dilakukan, siapa yang terlibat, dan bagaimana kendala atau hambatan diatasi.
- 5) Kepuasan Stakeholder: Mengukur kepuasan peserta program, staf pelaksana, dan pihak terkait lainnya terhadap hasil dan pelaksanaan program.
- 6) Keberlanjutan: Menilai sejauh mana hasil program dapat dipertahankan atau diperluas setelah intervensi berakhir.²¹

3. Evaluasi

Evaluasi program adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk melihat tingkat keberhasilan program.²² Evaluasi program adalah proses sistematis untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi guna menilai efektivitas, efisiensi, relevansi, dan dampak dari suatu program atau intervensi. Para ahli memiliki pandangan yang beragam mengenai evaluasi program, tetapi beberapa prinsip umum yang sering disebutkan antara lain:²³

a) Rossi, Lipsey, dan Freeman (2004)

Mereka menekankan pentingnya evaluasi dalam memahami bagaimana program berfungsi dan dalam memberikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Evaluasi harus berfokus pada pertanyaan-pertanyaan utama mengenai efektivitas dan dampak program.

²¹Michael Quinn Patton, *Metode Penelitian dan Evaluasi Kualitatif* (Thousand Oaks: Sage Publications, 2015), 120.

²²Pengertian evaluasi, <https://eprints.uny.ac.id/7772/3/BAB%20%20-%2010511247003>, diakses pada tanggal 27 Juli 2024, Pukul 17.17.

²³Stufflebeam, DL, & Shinkfield, AJ (2007). *Teori evaluasi, model, dan aplikasi*. Jossey-Bass.

b) Weiss (1998)

Carol H. Weiss berargumen bahwa evaluasi harus lebih dari sekadar penilaian hasil; evaluasi juga harus mencakup analisis proses dan konteks di mana program dilaksanakan. Ini membantu untuk memahami mengapa dan bagaimana program menghasilkan efek tertentu.

c) Scriven (1991)

Michael Scriven memperkenalkan konsep "formative" dan "summative" evaluation. Evaluasi formatif dilakukan selama pelaksanaan program untuk memberikan umpan balik yang dapat digunakan untuk perbaikan, sementara evaluasi sumatif dilakukan setelah program selesai untuk menilai keberhasilan secara keseluruhan.

d) Patton (1997)

Michael Quinn Patton mempromosikan pendekatan "Utilization-Focused Evaluation," yang menekankan pentingnya keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi untuk memastikan bahwa hasil evaluasi benar-benar digunakan untuk pengambilan keputusan dan perbaikan program.

e) Stufflebeam (2003)

Daniel Stufflebeam mengembangkan Model CIPP (Context, Input, Process, Product) yang menyediakan kerangka kerja komprehensif untuk mengevaluasi berbagai aspek program. Model ini membantu evaluator untuk menilai tidak hanya hasil akhir, tetapi juga proses dan masukan yang mendukung pelaksanaan program.

Secara umum, evaluasi program dianggap sebagai alat penting untuk memastikan bahwa sumber daya yang diinvestasikan dalam program digunakan secara efektif dan bahwa program tersebut menghasilkan dampak positif yang diharapkan. Evaluasi juga membantu

untuk mengidentifikasi area di mana perbaikan diperlukan, serta untuk membangun bukti yang dapat digunakan untuk merancang program-program masa depan.

Dalam penelitian ini penulis akan mengevaluasi dari Program Keluarga Harapan (PKH) di kelurahan rawa buaya dengan metode CIPP yang telah dikembangkan oleh daniel stufflebeam.

G. Metodologi penelitian

a) Jenis Penelitian

Dalam metode penelitian ini dengan menggunakan metode kualitatif, dengan model yang digunakan pada penelitian ini adalah model Evaluasi Program CIPP (*Context, Input, Proses and Product*). Model evaluasi CIPP adalah kerangka kerja yang komprehensif untuk melakukan evaluasi formatif dan sumatif suatu program, proyek, personil, produk, organisasi, kebijakan, dan sistem evaluasi. CIPP merupakan sebuah model evaluasi yang menggunakan pendekatan yang berorientasi pada manajemen.²⁴

Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan CIPP (*Context, Input, Process, Product*) adalah metode evaluasi yang digunakan untuk menilai efektivitas program atau proyek. Pendekatan ini dikembangkan oleh Daniel Stufflebeam dan timnya pada akhir tahun 1960-an. Berikut adalah penjelasan singkat tentang setiap komponen dalam model CIPP:

1. *Context* (Konteks): Mengevaluasi konteks di mana program atau proyek beroperasi, termasuk kebutuhan, masalah, dan kondisi lingkungan yang mempengaruhi program. Tujuannya adalah untuk memahami latar belakang dan alasan mengapa program atau proyek tersebut diperlukan.
2. *Input* (Masukan): Menilai sumber daya, strategi, dan rencana yang digunakan untuk menjalankan program atau proyek. Ini mencakup

²⁴Onny Fitriana dan Jamil Latief, "Evaluasi program PKL FKIP UHAMKA (Penelitian evaluatif berdasarkan CIPP)," *Jurnal Utilitas* 5, no. 1 (2019): 1–10.

analisis tentang bagaimana program tersebut dirancang dan sumber daya apa yang tersedia untuk mendukung pelaksanaannya.

3. Process (Proses): Mengevaluasi pelaksanaan program atau proyek itu sendiri. Ini melibatkan pemantauan bagaimana kegiatan dijalankan dan apakah mereka sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Fokusnya adalah pada identifikasi kekuatan dan kelemahan dalam implementasi.
4. Product (Produk): Menilai hasil atau dampak dari program atau proyek. Ini mencakup analisis tentang apakah tujuan program tercapai dan apa saja efek jangka pendek maupun jangka panjang dari program tersebut.²⁵

Pendekatan CIPP sangat cocok untuk penelitian kualitatif karena memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data yang mendalam dan holistik tentang program atau proyek yang dievaluasi. Teknik pengumpulan data yang umum digunakan meliputi wawancara, observasi, analisis dokumen, dan diskusi kelompok terfokus (focus group discussions).

b) Tempat Dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di kelurahan Rawa Buaya, Jl. Bojong Raya, RT 05/RW04, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11740, pada bulan Oktober-Desember 2023 untuk mengumpulkan informasi tentang Program Keluarga Harapan (PKH).

c) Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh informasi pada penelitian evaluasi ini, diterapkan teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan studi dokumentasi.

²⁵Daniel L. Stufflebeam, "Model Evaluasi CIPP," dalam *International Handbook of Educational Evaluation*, ed. T. Kellaghan, D. L. Stufflebeam, dan L. A. Wingate (Dordrecht: Springer, 2003), 31-62.

1. Observasi

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan observasi sebagai suatu peninjauan secara cermat atau pemeriksaan mendalam.²⁶ Observasi dalam arti luas berarti mengarahkan kegiatan secara cermat dan memperhatikan suatu fenomena, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antara berbagai aspek fenomena itu.

Ada beberapa para ahli turut mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian observasi. Berikut penjabarannya:

1) Larry Christensen

Observasi adalah cara untuk mendapatkan informasi penting mengenai orang, karena apa yang dikatakan belum tentu sesuai dengan yang dikerjakan.

2) Sutrisno Hadi

Observasi merupakan sebuah proses yang sangat kompleks, terdiri atas berbagai macam proses, baik biologis maupun psikologis, yang mana lebih memprioritaskan proses ingatan serta pengamatan.

3) Creswell

Observasi adalah proses pemerolehan data dari tangan pertama, dengan cara melakukan pengamatan orang serta lokasi dilakukannya penelitian.

4) Patton

Observasi merupakan metode yang sifatnya akurat dan spesifik untuk mengumpulkan data dan mencari informasi

²⁶“Teks Laporan Hasil Observasi” <https://www.idntimes.com/life/education/seo-intern/teks-laporan-hasil-observasi>, diakses pada 20 mei. 2023, pukul 03:18 WIB.

mengenai segala kegiatan yang dijadikan obyek kajian penelitian.

5) Margono

Mendefinisikan observasi sebagai teknik untuk melihat dan mengamati berbagai perubahan fenomena sosial yang terus tumbuh serta berkembang.

6) Suharsimi Arikunto

Observasi adalah proses pengamatan langsung suatu obyek yang ada di lingkungan, baik yang sedang berlangsung ataupun masih dalam tahapan, dengan menggunakan penginderaan. Observasi dilakukan secara sengaja atau sadar sesuai urutan yang ditentukan.

7) Gibson, R.L. dan Mitchell. M. H.

Observasi merupakan teknik yang digunakan sebagai seleksi derajat untuk menentukan sebuah keputusan serta konklusi terhadap orang yang sedang diamati.

Pengamat harus tenggelam dalam situasi yang realistis dan alami yang sedang berlangsung untuk melakukan pengamatan *naturalistik*, dan mereka harus memperhatikan suatu peristiwa, gejala atau sesuatu yang menjadi fokusnya. Sementara itu, individu yang menyebutkan fakta yang dapat diamati disebut sebagai *observer*.²⁷ Yang dimaksud *observer* ini yaitu seseorang yang melakukan observasi atau sedang melakukan pengamatan seperti untuk penggalan data atau informasi di lapangan.

Strategi pemilihan informasi dalam penelitian ini melibatkan kaidah teknik observasi dan observasi dilakukan

²⁷Ni'matuzahroh dan Susanti Prasetyaningrum, *Observasi Teori Aplikasi dalam Psikologi*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2018), h. 2.

dengan cara terjun langsung ke lapangan atau datang langsung ke lokasi. Observasi partisipatif dan observasi partisipatif pasif adalah dua jenis observasi.²⁸ Dalam melakukan observasi ini penulis menggunakan observasi partisipatif pasif yaitu peneliti datang ke tempat dimana proses itu dilaksanakan, tetapi tidak ikut terlibat dalam proses kegiatan tersebut. Dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan pengamatan dan melakukan pencatatan terhadap objek penelitian.

2. Wawancara

Menurut kenglinger wawancara adalah peran tatap muka interpersonal dimana satu orang bertanya kepada satu orang yang di wawancarai, beberapa pertanyaan yang dibuat untuk mendapatkan jawaban yang berhubungan dengan masalah penelitian.²⁹ Terdapat 3 jenis dalam metode wawancara yaitu:³⁰

a. Wawancara Terstruktur

Merupakan metode penilaian yang distandarisasi dan sistematis dengan memberikan beberapa pertanyaan yang telah di rancang sebelumnya. Pendekatan ini sudah di tentukan oleh peneliti sebagai acuan dalam penelitiannya. Dalam Wawancara terstruktur, pewawancara mengajukan serangkaian pertanyaan yang sama kepada semua narasumber dengan cara yang konsisten. Pertanyaan-pertanyaan tersebut biasanya dirancang untuk menilai keterampilan, pengalaman, atau kompetensi

²⁸Liya Istikomah, “Pemberdayaan Masyarakat dalam Program Urban Farming”, (Skripsi pada Fakultas Dakwah UIN SMH Banten, 2021), h. 27.

²⁹Fadhallah. R.A, “*Wawancara*” (Jakarta: Asosiasi Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia (APPTI), 2021), h. 1

³⁰<https://www.algobash.com/id/jenisjeniswawancara/#:~:text=Ada%20banyak> (Diakses oleh penulis pada 23 juli 2024)

tertentu yang relevan dengan pekerjaan. Wawancara ini paling cocok untuk peran yang membutuhkan keterampilan khusus, pengetahuan, atau kompetensi tertentu.

b. Wawancara Tidak Terstruktur

Dalam wawancara tidak terstruktur, pewawancara harus terlibat secara aktif dalam percakapan bersama narasumber. Wawancara tidak struktur ini merupakan adalah metode pendekatan yang lebih terbuka dalam melakukan interview untuk menilai narasumber. Pewawancara dapat mengajukan pertanyaan yang berbeda kepada masing-masing narasumber berdasarkan alur percakapan saat proses tanya jawab berlangsung.

c. Wawancara Semi Terstruktur

Dalam Wawancara semi terstruktur, pewawancara memulai dengan daftar pertanyaan kunci. Namun, pertanyaan tersebut tidak semata-mata di tanyakan semua seperti pada wawancara terstruktur. Pewawancara tetap dapat menanyakan hal lain yang lebih fleksibel. Wawancara semi terstruktur ini merupakan metode yang menggabungkan elemen-elemen dari wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Dimana teknik ini akan melibatkan sejumlah pertanyaan yang telah ditentukan sebelumnya, namun pewawancara tetap memungkinkan narasumber untuk merespons secara lebih luas dan fleksibel.

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil metode wawancara semi terstruktur dengan 10 masyarakat serta staf kelurahan, koordinator yang mengikuti Program Keluarga Harapan (PKH) untuk menyiapkan data-data serta informasi-informasi mengenai pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Rawa Buaya.

3. Dokumentasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dokumentasi adalah proses memilih, menyeleksi, mengolah, dan menyimpan pengetahuan. Dokumentasi juga diartikan sebagai penyediaan atau pengumpulan informasi dan bukti, seperti gambar, kutipan, kliping koran, dan sumber referensi lainnya.³¹ Seperti diketahui, dokumentasi dilahirkan oleh dua bersahabat Paul Otlet dan Henri La Fontaine pada 1895. Kerisauan mereka dipicu dengan meledaknya publikasi ilmiah sehubungan dipakainya mesin cetak. Mereka berpendapat dan berupaya membangun sistem yang mengumpulkan dan mengorganisasikan informasi terbitan ilmiah dan menyediakannya untuk keperluan masyarakat ilmiah. Kegiatan dan sistem yang dihasilkan itulah yang dinamakan dokumentasi. Wajar saja jika Kamus Besar Bahasa Indonesia (daring) mengartikan dokumentasi adalah:

- 1) Pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi dalam bidang pengetahuan; dan
- 2) Pemberian atau pengumpulan bukti dan keterangan (seperti gambar, kutipan, guntingan koran, dan bahan referensi lain)

Penulis menggunakan metode ini untuk mengumpulkan data atau dokumen terkait penelitian ini. Dokumen yang dikumpulkan oleh penulis berisi arsip atau informasi terkait Program Keluarga Harapan (PKH).

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam konteks penelitian PKH di Kelurahan Rawa Buaya adalah proses teratur untuk mencari, mengatur, dan menjelaskan data dari wawancara, catatan lapangan, dan

³¹Rully Desthian Pahlephi, "Dokumentasi adalah: Mengenal Fungsi, Kegiatan dan Jenisnya", *detikbali*, (16 November 2022).

dokumentasi. Proses ini melibatkan pengelompokan data ke dalam kategori, memilahnya menjadi unit-unit yang relevan, mengidentifikasi pola-pola tertentu, menentukan aspek-aspek yang penting untuk dikaji lebih lanjut, serta menarik kesimpulan dari temuan yang diperoleh.

5. Keabsahan Data

Keabsahan data pada penelitian kualitatif merupakan hal yang krusial untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipercaya. Berikut adalah beberapa teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian kualitatif yang dapat dilakukan:

1. Uji kredibilitas (kredibilitas)
2. Uji transferability (keteralihan)
3. Uji ketergantungan (ketergantungan)
4. Uji konfirmabilitas (konfirmabilitas)

Uji kelayakan dilaksanakan untuk menjamin bahwa data yang dihasilkan benar-benar merefleksikan pandangan subjek penelitian. Uji transferabilitas dilakukan guna menjamin bahwa hasil penelitian dapat diterapkan pada situasi yang berbeda. Uji ketergantungan dilakukan untuk memastikan bahwa hasil penelitian dapat diandalkan dan konsisten. Uji konfirmabilitas dilakukan untuk memastikan bahwa hasil penelitian dapat dikonfirmasi oleh peneliti lain.

Untuk memastikan keabsahan data, peneliti perlu mengikuti prinsip etika penelitian, seperti meminta izin dari subjek penelitian dan menjaga kerahasiaan data. Selain itu, pemilihan teknik pengumpulan data seperti observasi,

wawancara, atau dokumentasi harus disesuaikan dengan tujuan dan karakteristik penelitian.³²

H. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini, penelitian dibagi menjadi lima bab. Setiap bab terdiri dari sub bab pembahasan yang saling terkait satu sama lain. Berikut ini adalah struktur bab-bab dan sub bab-sub bab yang terdapat dalam skripsi ini:

BAB I : Pendahuluan

Memuat latar belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, tinjauan pustaka dan sistematika penulisan.

BAB II: Gambaran Umum

Dalam bab ini dipaparkan tentang sejarah terbentuknya PKH, struktur PKH di Kelurahan Rawa Buaya, dan profil Kelurahan Rawa Buaya.

BAB III: Temuan Dan Analisis

Membahas tentang bagian-bagian terpenting yang ditemukan di lapangan. Dalam bab ini dipaparkan tentang pengamatan dan wawancara terkait implementasi kebijakan program keluarga harapan sebagai penanggulangan kemiskinan di Rawa Buaya.

BAB IV : Analisis Data Dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang hasil penelitian evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Rawa Buaya yang meliputi kegiatan-kegiatan PKH itu sendiri dan tingkat partisipasi masyarakat Program Keluarga Harapan (PKH).

BAB V : Penutup

Memuat kesimpulan serta saran dari pembahasan semua permasalahan yang terdapat dalam skripsi sebagai bentuk hasil dari evaluasi dalam penelitian.

³²Arnild Augina Mekarisce, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat," *JURNAL ILMIAH KESEHATAN MASYARAKAT: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat* 12, no. 3 (2020): 145–51, <https://doi.org/10.52022/jikm.v12i3.102>.